

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemiskinan yaitu masalah yang bisa menjadi pusat perhatian di seluruh dunia, kemiskinan jadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintahnya. Utamanya pada negara-negara berkembang dengan jumlah kemiskinannya cukup hingga sangat tinggi. Berdasar pada penelitian Todaro dan Smith (Nur Wani & Arintoko, 2020) terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah penduduk miskin di negara-negara berkembang. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan alam, (2) variasi struktur industri, (3) kondisi geografis, demografis, dan tingkat pendapatan yang tidak sama, (4) perbedaan peran antara sektor publik dan swasta, (5) latar belakang sejarah yang berbeda akibat kolonisasi oleh negara yang berbeda, (6) ketergantungan pada kekuatan ekonominya serta politik negara lain, serta (7) distribusi kekuasaan, sistem politiknya, serta kelembagaan yang berbeda-beda.

Secara umum kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum Pendapat kuncoro dalam (Siti & Budiyanto, 2024). Menurut Bank Dunia salah satu faktor penyebab kemiskinan yaitu keterbatasan pendapatan serta kepemilikan aset yang dibutuhkan guna mencukupi kebutuhan pokok, seperti makanan, sandang, tempat tinggal, serta akses pada layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Tetapi belakangan kemiskinan dimaknai sebagai suatu kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasarnya serta adanya perbedaan perlakuan bagi

individu ataupun kelompok untuk menjalani kehidupannya secara bermartabat.

Hak-hak dasar yang dimaksud ialah berbagai kebutuhan, seperti pekerjaan, sumber daya alam, air bersih, rasa aman, hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial, lingkungan hidup, pendidikan, pangan, kesehatan, hingga perumahan. Makna lain dari kemiskinan yakni fenomena yang memiliki beragam dimensi dan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Salah satu contohnya adalah pendekatan sosiokultural, yang kerap mengaitkan kemiskinan di negara berkembang dengan faktor budaya yang negatif, seperti kemalasan, sikap apatis, rendahnya motivasi, serta minimnya semangat kewirausahaan. Keberagaman perspektif dalam mengkaji kemiskinan membuka ruang bagi tiap individu untuk menafsirkan masalah ini sesuai dengan kepentingan atau sudut pandang masing-masing (Siti & Budiyo, 2024)

Kemiskinan muncul karena adanya ketimpangan, ketimpangan yang dimaksud ialah ketimpangan dalam kepemilikan alat produksi, kemiskinan pun terkait dengan lingkungan dalam sebuah masyarakat, budaya hidup, dan sikap. Kemiskinan pun bisa dimaknai sebagai tidak berdayanya kelompok masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang mengakibatkan masyarakat ada dalam posisi lemah dan mengalami eksploitasi. Kemiskinan ialah kondisi di mana tidak adanya makanan, kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, kenyamanan, dan standar pelayanan

Kemiskinan yaitu keadaan di mana seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, layanan kesehatan, serta

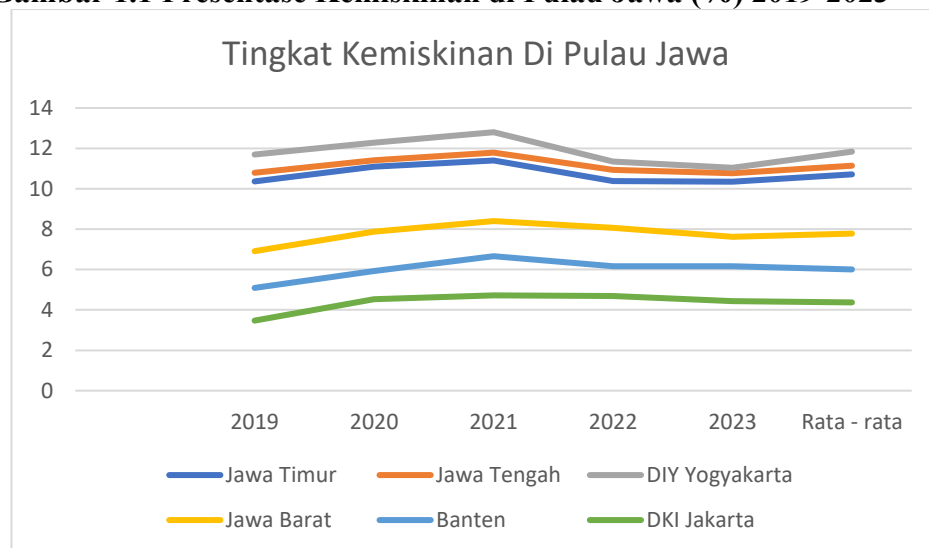
tempat tinggalnya(Sinurat, 2023). Sedangkan menurut (BPS) memberikan penjelasan bahwasannya fenomena kemiskinan yaitu kejadian atas ketidakmampuan tercapainya kebutuhan makanan maupun non-makanan sebagai standar hidup.

Di Indonesia, tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir tercatat berada pada kisaran 9% hingga 10% persen setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan jumlah yang signifikan bagi suatu negara. Tingkat kemiskinannya di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya, meskipun pada beberapa periode terlihat adanya tren penurunan. Namun, penyebaran wabah virus pada tahun 2020 menyebabkan lonjakan angka kemiskinan yaitu 0,91%. bila pada tahun 2019 tingkat kemiskinan berada di angka 9,22%, maka di tahun 2020 meningkat menjadi 10,19%. Meski demikian, di tahun 2021 angka tersebut menurun sedikit menjadi 10,14%, dan terus berkurang pada tahun 2022 hingga mencapai 9,71%.dan tahun 2023 angka kemiskinan di Indonesia turun dengan angka 9,36%.

Provinsi Jawa Timur mempunyai populasi lebih dari 40 juta jiwa yaitu salah satu kontributor perekonomian nasional. Kemiskinan tetap isu struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Dalam 5 tahun terakhir Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, serta kenaikan upah minumum tetapi tingkat kemiskinan bertahan siaats angka nasional. Berdasar pada data BPS, tingkat kemiskinannya di Jawa Timur pada 2023 mencapai 10,35%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 9,36%. Kondisi ini membuktikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan belum sepenuhnya merata dan inklusif. Ketimpangan

antarwilayah di Jawa Timur seperti Kabupaten Sampang mencatatkan angka kemiskinan tertinggi yaitu 20,36%, diikuti Bangkalan 18,24%, dan Probolinggo 17,01%. Di sisi lain, kota besar seperti Surabaya mencatatkan angka kemiskinan jauh lebih rendah, di bawah 5%. Ketimpangan spasial ini membuktikan adanya perbedaan yang tajam dalam akses pada pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kualitas infrastruktur antar daerah.

Gambar 1.1 Presentase Kemiskinan di Pulau Jawa (%) 2019-2023



Sumber: BPS (2023), data diolah

Berdasar pada data presentase tingkat kemiskinan di Pulau Jawa membuktikan ketimpangan antarprovinsi. Enam provinsi di wilayah ini mempunyai tingkat kemiskinan yang bervariasi, dengan Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Jawa Timur mencatat angka di atas 10%, sedangkan DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Banten berada di bawah angka tersebut. bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional antara tahun 2019 hingga 2023, Jawa Tengah menempati posisi kedua tertinggi, disusul Jawa Timur di posisi ketiga dengan angka 10,718%..

Presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren menurun meskipun berfluktuasi, penurunan ini diharapkan mampu mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi. Berdasar pada data dari BPS Provinsi Jawa Timur (2023), presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 yaitu 10,37% dan pada tahun 2020 yaitu 11,09%. Pada tahun 2021 yaitu 11,4% dan pada tahun 2023 yaitu 10,38% kemudian di tahun 2023 mengalami penurunan jadi 10,35%. Kenaikan pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan dikarenakan terjadi covid-19 masyarakat kehilangan pekerjaan. Meskipun jumlah kemiskinan mengalami penurunan secara bertahap, tetapi persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih berada di atas rata-rata nasionalnya. Maka, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan yang efektif guna menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Ketimpangan antarwilayah di Jawa Timur seperti Kabupaten Sampang mencatatkan angka kemiskinan tertinggi yaitu 20,36%, diikuti Bangkalan 18,24%, dan Probolinggo 17,01%. Kota besar seperti Surabaya mencatatkan angka kemiskinan jauh lebih rendah, di bawah 5%. Ketimpangan spasial ini menunjukkan adanya perbedaan yang tajam dalam akses pada pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kualitas infrastruktur antar daerah.

Tingkat kemiskinan dalam suatu negara dipengaruhi oleh berbagai indikator, diantaranya Tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan manusia, maupun besaran upah yang berlaku. Suatu negara yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa memengaruhi penurunan

angka penganggurannya. Penurunan angka pengangguran pun diharapkan bisa diikuti oleh tingkat upah. Terdapat perubahan yang signifikan dalam tingkat upah, maka akan berdampak pada penurunan jumlah penganggurannya. Sementara itu, besarnya tingkat inflasinya akan memberikan dampak pada jumlah penganggurannya yang bertambah.

Pembangunan ekonomi yaitu proses multidimensi yang didalamnya melibatkan perubahan pada berbagai aspek kelembagaan nasional, sikap masyarakat, serta struktur sosial, seperti halnya pengurangan ketidakmerataan, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi yang baik berkelanjutan dan tinggi yaitu sebuah kondisi utama untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan masyarakat. Terdapat suatu peningkatan pendapatan dalam setiap tahun karena peningkatan jumlah penduduk dalam setiap tahun dan konsumsi yang mengalami pertambahan. Salah satu cara memperhatikan pembangunan ekonomi sebuah negara bisa dilihat dari tingkat penganggurannya.

Pengangguran dalam perspektif ekonomi bisa diartikan sebagai ketidakmampuan pasar tenaga kerjanya untuk menyerap jumlah angkatan kerja yang ada. Hal itu karena beberapa faktor, yaitu: jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerjanya, ketidaksesuaian kompetensi pencari kerjanya dengan kebutuhan pasar tenaga kerjanya, serta kurangnya efektivitas informasi mengenai pasar kerjanya bagi para pencari kerja .

Berdasarkan data presentase tingkat kemiskinan di Pulau Jawa menunjukkan ketimpangan antarprovinsi. Enam provinsi di wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang bervariasi, dengan Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur mencatat angka di atas 10%, sedangkan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten berada di bawah angka tersebut. Jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional antara tahun 2019 hingga 2023, Jawa Tengah menempati posisi kedua tertinggi, disusul Jawa Timur di posisi ketiga dengan angka 10,718%..

Presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren menurun meskipun berfluktuasi, penurunan ini diharapkan mampu mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023), presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 10,37% dan pada tahun 2020 sebesar 11,09%. Pada tahun 2021 sebesar 11,4% dan pada tahun 2023 sebesar 10,38% kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,35%. Kenaikan pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan dikarenakan terjadi covid-19 masyarakat kehilangan pekerjaan. Walaupun terjadi penurunan secara bertahap jumlah kemiskinan, namun presentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur masih lebih tinggi di banding presentase kemiskinan nasional, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah dalam mengambil kebijakan yang efektif untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Ketimpangan antarwilayah di Jawa Timur seperti Kabupaten Sampang mencatatkan angka kemiskinan tertinggi sebesar 20,36%, diikuti

Bangkalan 18,24%, dan Probolinggo 17,01%. Kota besar seperti Surabaya mencatatkan angka kemiskinan jauh lebih rendah, di bawah 5%. Ketimpangan spasial ini menunjukkan adanya perbedaan yang tajam dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kualitas infrastruktur antar daerah.

Tingkat kemiskinan dalam suatu negara dipengaruhi oleh berbagai indikator, diantaranya Tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan manusia, dan besaran upah yang berlaku. Suatu negara yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mempengaruhi penurunan angka pengangguran. Penurunan angka pengangguran pun diharapkan dapat diikuti oleh tingkat upah. Terdapat perubahan yang signifikan dalam tingkat upah, maka akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran. Sementara itu, besarnya tingkat inflasi akan memberikan dampak pada jumlah pengangguran yang bertambah.

Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi yang didalamnya melibatkan perubahan pada berbagai aspek kelembagaan nasional, sikap masyarakat, dan struktur sosial, seperti halnya pengurangan ketidakmerataan, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi yang baik berkelanjutan dan tinggi merupakan sebuah kondisi utama untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan masyarakat. Terdapat suatu peningkatan pendapatan dalam setiap tahun karena peningkatan jumlah penduduk dalam setiap tahun dan konsumsi yang mengalami pertambahan. Salah satu cara

memperhatikan pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari tingkat penganggurannya.

Pengangguran dalam perspektif ekonomi bisa diartikan sebagai ketidakmampuan pasar tenaga kerjanya untuk menyerap jumlah angkatan kerja yang ada. Hal itu karena beberapa faktor, yaitu: jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerjanya, ketidaksesuaian kompetensi pencari kerjanya dengan kebutuhan pasar tenaga kerjanya, serta kurangnya efektivitas informasi mengenai pasar kerjanya bagi para pencari kerja(Suharnanik, 2023) .

Tingkat pengangguran bisa menunjukkan perekonomian suatu negara, baik dalam kondisi berkembang, lambat, atau justru mengalami kemunduran. Pengangguran bisa muncul karena berbagai hal, namun yang paling umum ialah adanya peningkatan angkatan kerja namun tidak disertai dengan lapangan pekerjaannya yang luas. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja pun melambat atau menurun persentasenya. Hal utama yang menyangkut mengenai angkatan kerja, BPS menyatakan terdapat kenaikan jumlah dalam setiap tahunnya. Pengangguran dalam bentuk yang sederhana yaitu diakibatkan oleh pertumbuhan permintaan tenaga kerja yang lambat baik di sektor industri modern maupun pertanian tradisional serta pertumbuhan penawaran tenaga kerja sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan penduduk serta urbanisasi(Hariyanto et al., 2020). Peningkatan angka pengangguran membuktikan bahwasanya terdapat kenaikan jumlah penduduk namun tidak disertai dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Setiap tahunnya, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan, namun tidak disertai dengan

tersedianya lapangan pekerjaan, mengakibatkan melebarnya GAP, terlebih bila terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi tidak hanya menimbulkan jurang antara jumlah angkatan kerja dan tersedianya lapangan kerja, namun memberikan dampak lainnya yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal itulah yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.

Menurut Penelitian Todaro dan Smith dalam (Frisnoiry et al., 2024) mengemukakan bahwasanya adanya kemiskinan disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu rendahnya pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, lambatnya pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, kurang memadainya layanan kesehatan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, kemiskinan karena indeks pembangunannya yang rendah serta meningkatnya jumlah penganggurannya.

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: BPS 2023, data diolah

Berdasarkan gambar 1.1 tingkat kemiskinannya turut dipengaruhi oleh jumlah pengangguran terbuka; semakin banyak individu yang tidak

bekerja maka semakin sedikit pula sumber pendapatan yang dimiliki, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari menjadi sulit dipenuhi. Meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu 3,28%, angka tersebut justru melonjak pada tahun 2020 menjadi 5,84%. Kenaikan ini cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya dan mencerminkan tingginya angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, kondisi mulai membaik pada tahun 2021 hingga 2022, di mana tingkat pengangguran menurun dari 5,74% menjadi 5,49%. Penurunan ini dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ekonomi serta upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerjanya yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas, sehingga diharapkan tingkat pengangguran di Jawa Timur dapat terus menurun.

Kualitas SDM turut berkontribusi sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinannya. Kualitas ini biasanya diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau indeks kualitas hidup. IPM berguna untuk menilai serta membandingkan tingkat pembangunan manusia, baik antar negara ataupun antar wilayahnya. Indeks ini jadi indikator penting untuk mengetahui sejauh mana pembangunan manusia sudah dicapai di suatu daerah. Selain itu, rendahnya nilai atau kualitas tenaga kerja juga bisa mencerminkan tingginya tingkat kemiskinan. Sebagai indikator pembangunan, IPM idealnya mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan kemiskinan artinya, semakin tingginya IPM suatu daerah, maka kualitas hidup masyarakatnya seharusnya juga lebih baik, serta tingkat kemiskinannya lebih rendah (Sukron & Yasin, 2021)

IPM bisa dipakai untuk melihat seberapa besar nilai dari tenaga kerja yang ada. IPM ialah indeks gabungan yang bisa menaksir pertumbuhan manusia melalui tiga faktor fundamental, yakni tingkat kehidupan yang layak, serta umur panjang dan hidup sehat (Prayoga et al., 2021). Produktivitas tenaga kerja menurun seiring dengan menurunnya indeks pembangunan manusia tenaga kerja tersebut.

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur



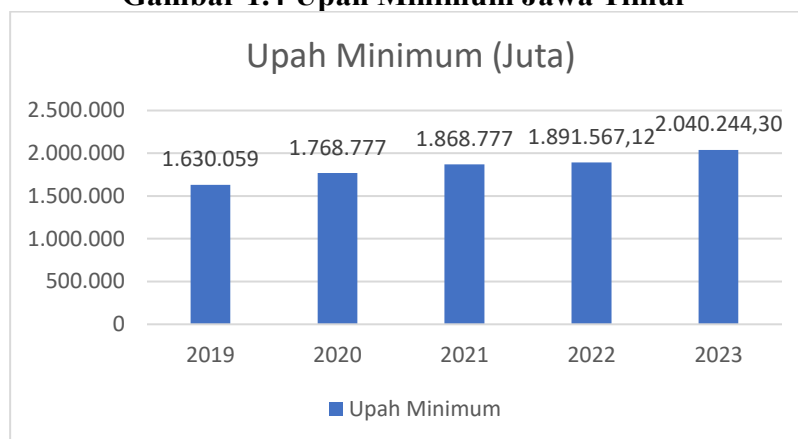
Sumber: BPS 2023, data diolah

Berdasarkan Gambar 1.2 nilai IPM di Provinsi Jawa Timur terus memperlihatkan peningkatan selama periode 2019–2023. Tingkat kemiskinannya pada suatu wilayah bisa dipengaruhi oleh nilai IPM, sebab secara ideal, daerah yang mempunyai IPM tinggi membuktikan kualitas hidup masyarakat yang baik. Dengan kata lain, bila IPM suatu daerah tinggi, maka tingkat kemiskinannya di wilayah tersebut semestinya cenderung rendah (Krisna et al., 2023).

Salah satu faktor yang bisa memengaruhi tingkat kemiskinannya yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK). UMK yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengatur sistem pengupahan guna menjamin kesejahteraan para pekerja. Karena upah yaitu sumber utama pendapatan, bila

pendapatan tersebut menurun atau stagnan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut menurun atau tidak mengalami peningkatan, yang pada akhirnya punya dampak pada naiknya tingkat kemiskinan (Balqis et al., 2025)

Gambar 1.4 Upah Minimum Jawa Timur



Sumber: BPS 2023, data diolah

Berdasarkan gambar 1.3 upah minimum di Jawa Timur selama 2019–2023 bersifat fluktuatif. Tahun 2019 tercatat Rp1.630.059, lalu terus naik hingga mencapai Rp2.040.244 pada 2023. Kenaikan upah minimum ini membuktikan hubungan dengan tingkat kemiskinan, sebab upah yang lebih tinggi memberi pekerja daya beli yang lebih baik. Namun, peningkatannya tetap harus disesuaikan dengan produktivitas serta kondisi ekonomi yang berlaku.

Berdasar pada uraian di atas, sejatinya kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan perbaikan diungkapkan oleh turunnya presentase penduduk miskin, demikian kuantitas penduduk di Provinsi Jawa Timur cukup fluktuatif cenderung bertambah dari tahun ke tahun, sedangkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur dalam rentang tahun 2019-2023 cenderung menurun yang menandakan efektivitas pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, dan IPM cenderung meningkat serta upah

minimum cukup naik setiap tahunnya. Berdasar pada uraian datanya penulis ingin melaksanakan penelitian terkait **“Pengaruh, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakangnya, maka bisa ditarik suatu rumusan masalahnya pada penelitiannya, yaitu:

1. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuannya mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan di Jawa Timur dipengaruhi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia , upah minimum. Tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

1. Penelitian ini memakai data deret waktu yang mencakup Provinsi Jawa Timur selama periode 2007 hingga 2023..
2. Pada penelitiannya, variable dependen yang dianalisis yaitu tingkat kemiskinan, sementara variable independennya meliputi tingkat pengangguran terbuka, IPM, serta upah minimum.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam melakukan ini, baik secara akademis maupun praktis.

Berikut manfaat yang diberikan peneliti:

1. Manfaat Praktis Hasil penelitiannya diharapkan bisa menjelaskan hubungan antara tingkat kemiskinan serta faktor-faktor terkait di Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa menjadi dasar dalam merumuskan strategi atau kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah daerah bisa menjadikan temuan ini sebagai acuan pada pengambilan keputusan.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitiannya diharapkan bisa memperluas pemahaman kalangan akademisi mengenai pendekatan yang diterapkan di Jawa Timur dalam mengatasi kemiskinannya.
 - b. Penelitiannya diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga bisa memperluas wawasan peneliti atau mahasiswa lain. Temuan yang didapat bisa dipakai untuk menghubungkan teori serta konsep yang dipelajari di ruang kelas dengan kondisi nyata yang ada di dunia kerja.